

Gubernur Serahkan BLT Kepada Tujuh Ribu KK Di Bartim

TAMIYANG LAYANG - Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran serahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 7.132 kartu keluarga (KK) di Kabupaten Barito Timur (Bartim). BLT tersebut diserahkan secara simbolis kepada beberapa penerima di halaman Kantor Bupati Kabupaten Bartim dengan total Rp3,5 miliar lebih. Diungkapkannya, BLT ini merupakan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang dirasa membutuhkan karena terdampak Covid-19, tentu dengan data yang diusulkan oleh Pemkab Bartim. Dalam kondisi saat ini, pemerintah harus turun untuk masyarakat Kalteng.

“Penyerahan BLT ini melalui perantara Bank Kalteng, sebelumnya masyarakat miskin sudah terdata dan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan di acara penerimaan BLT secara simbolis.

Orang nomor satu di Kalteng ini juga meminta agar kepala daerah dalam hal ini Bupati Bartim empati kepada masyarakat. Pihaknya selaku pimpinan di Bumi Tambun Bungai ini tidak ingin ada masyarakat Kalteng yang kelaparan. “Untuk itu, dalam pendataan maupun penyaluran bansos ini jangan sampai ada atribut politik, bupati adalah bapak seluruh masyarakat di kabupaten sehingga tidak ada sangkut paut dengan partai,” ucap Sugianto.

Pihaknya juga meminta agar penyaluran bansos ini tidak ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Penyaluran harus tepat sasaran, jangan sampai ada orang kaya menerima bantuan. “Saya yakin masih ada masyarakat yang membutuhkan tetapi belum terdata, pemerintah daerah dan unsur forkopimjanya harus bekerja keras bahu membahu melakukan pendataan,” bebernya.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga menjelaskan, Pemprov Kalteng terus berupaya untuk menangani Covid-19 beserta dampaknya, termasuk kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat pandemi Covid-19. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto berharap bantuan yang diberikan Pemprov Kalteng dapat meringankan beban masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur. “Jangan menyerah, tetap semangat. Tetap ikuti imbauan dari pemerintah, karena yang dilakukan pemerintah untuk keselamatan kita bersama,” tutur dia.

Pihaknya juga membuka ruang pengaduan yang mengetahui ada masyarakat membutuhkan tetapi belum mendapat bantuan. Pihaknya tidak menginginkan ada masyarakat Kalteng kelaparan. Saat menyerahkan bantuan itu, gubernur juga didampingi Anggota DPR RI Dapil Kalteng H Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala Bappedalitbang Kalteng Yuren S Bahat dan Plt Kadis PemDes Kalteng Rojikinnor. Selesai Penyerahan BLT, gubernur didampingi bupati Bartim, anggota DPR RI Dapil Kalteng dan Kapolda Kalteng melakukan peninjauan ke posko di Perbatasan Pasir Panas. Di posko tersebut, Gubernur Sugianto menyerahkan bantuan masker non medis sebanyak 20 ribu pieces, untuk dibagikan kepada masyarakat setempat, sebagai upaya untuk menurunkan resiko penyebaran Covid-19. “Selain untuk Tim Gugus dalam bertugas, juga dapat dibagikan langsung kepada warga yang melintas di wilayah hukum Polres Bartim,” pungkas Gubernur Sugianto Sabran.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Gubernur Serahkan BLT Kepada Tujuh Ribu KK Di Bartim*, Jumat, 22 Mei 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Gubernur Luncurkan Bantuan Langsung Tunai Pemprov Kalteng di Barito Timur*, Jumat, 22 Mei 2020.

Catatan Berita:

Pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf i Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.